

JURNAL IPTEK PERTANAHAN

Pergeseran Urutan Legalisasi Aset dan Administrasi Publik Lama Ke Pelayanan Publik Baru dalam Kerangka Pergeseran
Pertanahan Demokratis
Andan Toban

Legalisasi Aset dan Dampaknya Terhadap Akses Masyarakat Sektor
Ahmad Nuzul Lutfi

Rasa Memiliki dan Budaya Organisasi Badan Pertanahan Nasional
Wawan Edi Kusumawong

Policy Network Penyelesaian Sengketa Tanah
Nening Haryono

Legalisasi Aset Sumber Daya Tanah (Studi Telaah Normatif)
Imam Kusumawong

Telaahan Teknis Yuridis Pendaftaran HGR Atas dan Bawah Tanah Melalui Sistem 3 Dimensi Hak Guna Ruang Atas Tanah
Dan Hak Guna Ruang Bawah Tanah
Rizal Anshari

Analisis Kondusifitas Iklim Investasi Daerah dari Perspektif Kemudahan Perolehan Tanah (Studi Kasus : Kota Surabaya)
Baga Haryo Tjo

Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Badan Pertanahan Nasional
Sholahudin Muzawaroh

Kerjasama Antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan
Dwi Supriyanto



DITERBITKAN OLEH :
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

JURNAL IPTEK PERTANAHAN

ISSN 1411-1101
Vol. 3
No. 1
Maret 2013

Penanggung Jawab

Managam Manurung, SH., M.Kn

Redaktur

Ir. Iwan Taruna Isa, MURP

Dra. Ratna Djuita

Mitra Bestari

Prof. Endriatmo Soetarto, MA

Pakar Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc

Pakar Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor

Dr. Satyawan Sunito

Pakar Agraria Institut Pertanian Bogor

Noer Fauzi Rachman

Pemecah Agraria

Penyunting Pelaksana

Dr. Aslan Noor, SH., MH., SP1

Pakar Ilmu Hukum Tata Negara

Tri Sakti, SH., CN., MH

Peneliti Bidang Pertanahan

Munyarief, A.Ptnh, M.Si

Ekonomi Pertambangan Sumber Daya Agraria

Arditya Wicaksono, S.IP.

Penelitian Publik di Bidang Pertanahan

Desain Grafis & Fotografer

Shofiatul Munawaroh, S.Kom

Sekretariat

Jamaludin, SH

Robin Tua Halomoan Sijabat, S.Kom

Lusia Tri Harjanti, SE

Affan Hilman Sutarto, S.AP

Novianti Bintari, SP

**Pusat Penelitian dan Pengembangan
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**

Jl. H. Agus Salim No.58 Jakarta Pusat

Telp./Fax. (021) 3909016

e-mail : puslitbang@bpn.go.id

Frekuensi terbit dua kali setahun, setiap bulan Mei dan November

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca Yang Terhormat,

Selamat bertemu kembali dalam Jurnal *Ispek Pertanahan* Volume I Nomor 3 Tahun 2013, dan kami tampil dengan mengusung hal-hal baru, kekinian dan bersifat mendasar dalam mengetahui, dan memahami pertanahan dari berbagai perspektif pengetahuan dan disiplin keilmuan. Kami sengaja tidak menentukan tema dalam penerbitan jurnal ini, agar pembaca dapat memperoleh cakrawala pandang yang luas tentang pertanahan dalam konteks keilmuan dan teknologi. Kemampuan substantif yang dimiliki penulis disuguhkan secara apik sebagai berikut:

Mengawali Jurnal ini, **Amien Tohari** dalam artikelnya yang berjudul **"Pergeseran Urusan Legalisasi Aset dari Administrasi Publik Lama ke Pelayanan Publik Baru dalam Kerangka Pengurusan Pertanahan Demokratis"** memaparkan bagaimana posisi legalisasi aset dalam kaitannya dengan 4 hal yaitu perubahan sosial, meningkatnya persoalan agraria, paradigma pelayanan pertanahan, dan birokrasi agraria secara luas. Menurut penulis meluasnya konflik dan problema agraria bukan hanya terletak pada konsep legalisasi aset tetapi juga pada paradigma pelayanan birokrasi agraria itu sendiri.

Dalam tulisan yang lain, **Ahmad Nashih Luthfi** memaparkan bagaimana legalisasi aset seharusnya dilaksanakan agar dapat benar-benar mencapai tujuan yaitu memperkuat keamanan tenurial dan kesejahteraan pemegang hak. hal tersebut disampaikan dalam artikelnya berjudul **"Legalisasi Aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar"**.

Wawan Edi Kuswandoro dalam tulisannya yang berjudul **"Rasa Memiliki dan Budaya Organisasi Badan Pertanahan Nasional"**, menyampaikan bagaimana menciptakan Solidaritas, Keterbukaan, dan Integritas dilandasi oleh aspek kepercayaan, Keterbukaan, Berpikir Positif, Rasionalitas dan efisiensi mampu menjadi bahan refleksi keberhasilan organisasi, yang untuk kemudian dapat diadopsi oleh BPN RI sehingga kinerja dan hasil yang diharapkan visi yang ditetapkan oleh BPN.

Dalam penyelesaian sengketa pertanahan, **Nanang Haryono** dalam tulisannya **"Policy Network Penyelesaian Sengketa Tanah"** memaparkan upaya penyelesaian sengketa melalui *Policy Networks* antara *Government*, *Civil Society* dan *Private sector*. Hal ini diharapkan mampu memberikan solusi melalui kebijakan yang deliberatif yang menguntungkan semua pihak khususnya kepentingan publik.

Dalam usaha melegalisasi tanah-tanah milik instansi pemerintah dapat mendukung dan memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia disampaikan oleh **Imam Koeswahyono** dalam tulisannya berjudul **"Legalisasi Aset Sumber Daya Tanah (Suatu Telaah Normatif)"**.

Rizal Anshari dalam tulisannya berjudul **"Telaahan Teknis Yuridis Pendaftaran HGR Atas dan Bawah Tanah Melalui Sistem 3 Dimensi"**, menyampaikan bahwa, pentingnya lembaga hukum baru yang mengatur mengenai penguasaan dan penggunaan ruang dibawah dan diatas permukaan bumi dalam mengantisipasi kebutuhan akan pembangunan.

Bagas Haryotojo dalam tulisannya berjudul **"Analisis Kondusifitas Iklim Investasi Daerah dari Perspektif Kemudahan Perolehan Tanah (Studi Kasus : Kota Surabaya)"** memaparkan pengaruh iklim investasi disuatu

wilayah terhadap kemudahan perolehan tanah.

Biofitatul munawaroh dalam tulisannya tentang **"Penerapan Balance Scorecard sebagai Tolek Ukur Pentalan Kinerja Badan Pertanahan Nasional"** memaparkan penerapan metode yang menyangkut 4 aspek secara seimbang di lingkungan Badan pertanahan Nasional

dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, dalam tulisannya berjudul **"Kerjasama Antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan"**. Dwi Suprastyo menyampaikan pentingnya sinergi antara Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Pertanian.

Pembaca dimana saja berada, Harapan kami, isi jurnal ini dapat menjadi peletak dasar bagi pengambil kebijakan dalam menyusun naskah akademis dari berbagai peraturan perundang – undangan pertanahan. Tiada kesempurnaan dalam perbuatan karena kesempurnaan adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, diperlukan saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan pengembangan jurnal lebih lanjut.

Atas kerja keras tim dan penulis pada jurnal lptek pertanahan, akhirnya kepada Allah jualah segalanya diserahkan. Semoga jurnal ini bermanfaat bagi organisasi BPN pada khususnya, dan kepada siapa saja yang membutuhkannya.

Terima kasih dan Selamat membaca

Salam Redaktur

DAFTAR ISI

1. Pergeseran Urusan Legalisasi Aset dari Administrasi Publik Lama Ke Pelayanan Publik Baru dalam Kerangka Pengurusan Pertanahan Demokratis..... <i>Amien Tohari</i>	1	-	14
2. Legalisasi Aset dan Dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar <i>Ahmad Nasih Luthfi</i>	15	-	32
3. Rasa Memiliki dan Budaya Organisasi Badan Pertanahan Nasional <i>Wawan Edi Kuswandro</i>	33	-	44
4. <i>Policy Network</i> Penyelesaian Sengketa Tanah..... <i>Nanang Haryono</i>	45	-	56
5. Legalisasi Aset Sumber Daya Tanah (Suatu Telaah Normatif) <i>Imam Koeswahyono</i>	57	-	70
6. Telaahan Teknis Yuridis Pendaftaran HGR Atas dan Bawah Tanah Melalui Sistem 3 Dimensi Hak Guna Ruang Atas Tanah Dan Hak Guna Ruang Bawah Tanah..... <i>Rizal Anshari</i>	71	-	80
7. Analisis Kondusifitas Iklim Investasi Daerah dari Perspektif Kemudahan Perolehan Tanah (Studi Kasus : Kota Surabaya) <i>Bagas HaryoTejo</i>	81	-	96
8. Penerapan <i>Balanced Scorecard</i> Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Badan Pertanahan Nasional <i>Shofiatul Munawaroh</i>	97	-	112
9. Kerjasama Antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan <i>Dwi Suprastyo</i>	113	-	122

Aminah Tohari (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

PERGESERAN URUSAN LEGALISASI ASET DARI ADMINISTRASI PUBLIK LAMA KE PELAYANAN PUBLIK BARU DALAM KERANGKA PENGURUSAN PERTANAHAN DEMOKRATIS

Jurnal IPTEK Pertanian, Volume 3, Nomor 1, Mei 2013, Halaman : 1 - 16

ABSTRAK

Tulisan ini membahas legalisasi aset dalam kaitannya dengan perubahan aspek kepemilikan tanah agraria, paradigma pelayanan pertanahan, dan budaya agraria yang ada. Saya berpendapat bahwa masalahnya tidak hanya masalah agraria melainkan masalah tata kelola pemerintahan antara lain perubahan paradigma agraria dengan cara mengadopsi paradigma agraria. Perubahan paradigma bukan hanya terletak dalam konsep legalisasi aset tetapi juga mengadopsi di dalam paradigma pelayanan agraria agraria di sendiri. Legalisasi aset tidak dapat menjadi suatu penyelesaian masalah agraria apabila tetap dipandang oleh paradigma agraria yang masih menerapkan administrasi publik gaya lama pertanahan dalam era yang baru, sehingga dalam rangka pelayanan pertanahan yang kompetitif dengan dinamika perubahan masyarakat perlu suatu sistem dan demokrasi government di wilayah strategis dan new public service di wilayah pelayanan publik pertanahan.

Kata Kunci : Legalisasi Aset, Perubahan Sosial dan Paradigma Pelayanan Publik

Ahmad Nasih Luthfi (Sekolah Tinggi Pertanian Nasional)

LEGALISASI ASET DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKSES MASYARAKAT RUKUN

Jurnal IPTEK Pertanian, Volume 3, Nomor 1, Mei 2013, Halaman : 17 - 22

ABSTRAK

Legalisasi aset yang bertujuan memperkuat keamanan tanah dan kesejahteraan pemegang hak perlu dapat memfasilitasi proses pelaksanaan atas tanah jika tanpa didahului kebijakan redistribusi yang bertujuan untuk kembali diferensiasi agraria. Legalisasi aset berfungsi ganda (the double edge of exclusion) di satu sisi diperlukan untuk melindungi atau menjamin kepemilikan secara legal hak atas tanah bagi pemegangnya, namun di sisi lain ia memiliki efek eksklusif atau membatasi pihak lain berkemampuan mengakses atas tanah itu. Legalisasi aset untuk tujuan pemertanahan di atas wilayah yang didefinisikan sebagai tanah negara yang berakibat membatasi hak masyarakat guna mengkonsumsinya akan mendorong transfer agraria kapitalistik. Terkecuali jika legalisasi aset mengkonsumsikan kepemilikan komunal masyarakat sebagaimana pelaksanaan dari dua kasus yang dikaji tanah buduhan di desa adat Ngantapan Puhwang dan kepemilikan buduh perkotaan di Tasikmalaya.

Kata kunci : legalisasi aset, redistribusi, the double edge of exclusion, tanah komunal

Wawan Edi Kuswandoro (Universitas Brawijaya, Malang)

RASA MEMILIKI DAN BUDAYA ORGANISASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jurnal IPTEK Pertanian, Volume 3, Nomor 1, Mei 2013, Halaman : 23 - 44

ABSTRAK

Menciptakan Solidaritas, Keterbukaan, dan Integritas oleh fondasi oleh kepercayaan, Keterbukaan, Berpikir Positif, Rasionalitas dan efisiensi beberapa aspek yang bisa dijadikan bahan refleksi terkait keberhasilan organisasi yang mungkin saja didapati oleh Badan Pertanahan Nasional. Organisasi memberikan pelayanan harus dimulai dengan komitmen yang kemudian ditanamkan untuk menjadi budaya organisasi. Budaya Perusahaan, bisa hanya perubahan tertulis dasar operasional atau cara sistematis dari bentuk seperti kredibilitas, inovasi. Jadi ke depan setiap langkah yang diambil selalu didasarkan oleh Kapuran, Kumpatensi, dan inspirasi. Jadi tanah dari hasil yang diharapkan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci : Budaya Organisasi, dan Organisasi Pemerintah

Nanang Haryono (Universitas Airlangga, Surabaya)

POLICY NETWORK PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

Jurnal IPTEK Pertanian, Volume 3, Nomor 1, Mei 2013, Halaman : 45- 56

ABSTRAK

Sengketa tanah merupakan permasalahan publik yang harus segera dicari jalan keluarnya dalam kerangka negara demokrasi. Pada era otonomi daerah dengan diberlakukannya UU No 32 Th 2004 dimana memberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintah lokal untuk mengelola wilayahnya belum mampu menyelesaikan permasalahan agraria pada masyarakat secara maksimal. Prinsip-prinsip keadilan dan ruang publik untuk pencapaian suatu kebijakan yang bisa diterima banyak pihak merupakan alternatif penyelesaian masalah sengketa tanah. Paper ini ingin membahas

Bagas Haryo Taja (Peneliti pada Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Perdagangan)

ANALISIS KONDUSIFITAS IKLIM INVESTASI DAERAH DARI PERSPEKTIF KEMUDAHAN PEROLEHAN TANAH (STUDI KASUS : KOTA SURABAYA)

Jurnal IPTEK Pertanian, Volume 3, Nomor 1, Mei 2013, Halaman : 81 - 95

ABSTRAK

Iklim investasi suatu negara atau daerah mencerminkan kinerja kebijakan pemerintah, baik dalam hal lain konsep meliputi tingkat operasinya. Secara umum, saat ini iklim investasi di Indonesia tidak dalam kondisi memuaskan. Salah satu yang paling penting yang mempengaruhi iklim investasi adalah pengadaan tanah. Tujuan utama dan penelitian ini adalah untuk mengembangkan indikator kemampuan atau kondusifitas iklim investasi terutama dari perspektif pengadaan tanah. Berdasarkan tujuan spesifik, survei tentang pengadaan tanah dari kemudahan penggunaan lahan untuk investasi secara detail, baik dari segi regulasi dan implementasinya yang dapat diukur, diadopsi dan diuji secara transparan dan lebih mudah untuk melakukan analisis kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei pada aspek teknis (mikro) dengan Daerah Jawa Timur sebagai daerah penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai aspek makro yang melaksanakannya. Hasil penelitian iklim investasi di Surabaya menunjukkan bahwa Surabaya dalam hal skala prioritas yang diperoleh. Hasil penelitian iklim investasi di Surabaya menunjukkan bahwa Surabaya dalam hal kejelasan lahan memiliki bobot 1.548 dan pengadaan lahan memiliki bobot 1.474. Dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah untuk investasi di Surabaya tidak mendukung iklim investasi secara keseluruhan. Implikasi kebijakannya adalah bahwa kemungkinan perbaikan iklim investasi masih sangat diperlukan, setidaknya dengan meningkatkan kinerja berbagai indikator yang disebutkan sebelumnya.

Kata kunci: Iklim Investasi, Pengadaan Tanah, Indikator

Shofiatul Munawaroh (Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI)

PENERAPAN BALANCED SCORECARD SEBAGAI TOLOK UKUR PENILAIAN KINERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jurnal IPTEK Pertanian, Volume 3, Nomor 1, Mei 2013, Halaman : 97 - 112

ABSTRAK

Balance Scorecard menyangkut empat perspektif yaitu: Perspektif Keuangan, Customer Klien, Organisasi Internal belajar dan pertumbuhan. Kinerja merupakan salah satu faktor vital bagi perusahaan. Pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan perusahaan dan dasar penyusunan imbalan intracorporate. Pimpinan yang berhasil dinilai dalam keberhasilan dan mendapat visi dari perusahaan. Namun, menilai kinerja perusahaan semata-mata dari sisi keuangan akan dapat menyesatkan. Sebaliknya, kinerja keuangan yang kurang baik dalam jangka pendek dapat tercapai karena perusahaan melakukan investasinya demi kepentingan jangka panjang. Untuk mengatasi kekurangan ini, maka diciptakan oleh pendekatan metode pengukuran kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan 4 aspek yaitu aspek keuangan, customer klien, proses bisnis internal dan proses belajar dan tumbuh.

Kata kunci: Balance Scorecard, Kinerja, Organisasi

Dwi Suprasto (Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI)

KERJASAMA ANTARA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KEMENTERIAN PERTANAHAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

Jurnal IPTEK Pertanian, Volume 3, Nomor 1, Mei 2013, Halaman : 113 - 122

ABSTRAK

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun telah diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa tanah merupakan sumber kemakmuran rakyat, namun jumlah rakyat miskin Indonesia masih cukup besar (sekitar 39 juta jiwa). Hal ini terjadi karena masih terjadi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Lebih lanjut, permasalahan pertanian ini akan berdampak terhadap rapuhnya ketahanan pangan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Adanya program redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, bisa sedikit meringankan permasalahan ketimpangan penguasaan tanah. Petani yang menjadi sasaran penerima program ini, tidak boleh ditinggal begitu saja, namun harus diberdayakan agar tanah yang diperoleh bisa dimanfaatkan agar bisa berproduksi. Untuk itulah, program akses reform sangat dibutuhkan dalam rangka memberdayakan petani. Kementerian pertanian selaku lembaga teknis yang berkompeten membina petani, berkewajiban membimbing petani agar bisa mengusahakan tanahnya dengan baik. Diharapkan dengan sinergi antara Badan Pertanahan Nasional RI dan Kementerian Pertanian, petani Indonesia bisa memberdayakan dirinya sendiri serta tanah yang diperolehnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarga sekaligus mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Kata Kunci: redistribusi tanah, akses reform, P4T, permodalan, ketahanan pangan

Amien Tohari (Gajah Mada University, Yogyakarta)

REPOSITION BUSINESS ASSET LEGALIZATION INTO NEW PUBLIC SERVICE FRAMEWORK ON DEMOCRATIC LANDS

Journal IPTEK Pertanahan, Volume 3, No.1, May 2013, Page : 1 - 14

ABSTRACT

This paper lays assets legalization widely related to social changes, agrarian issues, land service paradigm, and agrarian bureaucracy. I argue that widespread conflict and agrarian problems is an indication of gap between quick change of agrarian problem and its response by agrarian bureaucracy. Its main problem, I think, not only lay on asset legalization concept but also related to its agrarian service paradigm. Assets legalization cannot be resolution to the agrarian problem effectively if agrarian bureaucracy still implement old public administrative because it a accommodations with agrarian changes that occurred in society. Therefore, assets legalization needs to be placed in a land management scheme that is compatible with the dynamics of agrarian changes. Land Democratic Governance (LDG) can become a basic framework for implementation of new public service in the areas of land governance.

Keywords: Legalization Assets, Social Change and Public Service Paradigm

Ahmad Nashih Luthfi (National Land of College)

LEGALIZATION ASSETS AND THEIR IMPACT ON THE COMMUNITY ACCESS

Journal IPTEK Pertanahan, Volume 3, No.1, May 2013, Page : 15 - 32

ABSTRACT

Asset legalization aims to strengthen tenurial security and elevate welfare of the people without land redistribution policy to restructure agrarian differentiation yet, precisely facilitates process of land release. Asset legalization have double edge of exclusion: giving tenurial security for the holder, but also restraining access of the land to the other. Asset legalization for land market and implemented on area definitely as "state domain" that causes restraining access of the area for the people, leads capitalistic agrarian transition. Aside from these purposes, is when asset legalization accommodates communal property of the people as two exemplary cases: land of buruhan in adat village (Kampung Purworejo), and cooperative labor plantation in Tasikmalaya.

Keywords: asset legalization, redistribution, the double edge of exclusion, communal land-property

Wawan Edi Kuswandoro (Brawijaya university, Malang)

THE OWNERSHIP CONCEPTUAL NATIONAL LAND AGENCY

Journal IPTEK Pertanahan, Volume 3, No.1, May 2013, Page : 33 - 44

ABSTRACT

Creates Solidarity, Openness, and Integrity by based on by position of job activity. Trust, Openness, Trusting, Positive Rationality and efficiency, some aspects which able to be made related reflection material success of organization which might possibly be adopted by National Land Agency. Organization giving service must be started with a commitment that is then is inculcated to become an organization culture. Corporate Culture, is not simply regulation is written, operational base, or systematic way from the such borne credibility, innovation. So to the fore every step taken always based by Honesty, Competence, and Inspiration. So performance and result expected as according to vision which has been specified by National Land Agency.

Keywords: Corporate Culture, and Organization

Nansang Haryono (Airlangga University, Surabaya)

POLICY NETWORKS OF LAND DISPUTE RESOLUTION

Journal IPTEK Pertanahan, Volume 3, No.1, May 2013, Page : 45 - 56

ABSTRACT

Public land dispute is a problem that must be immediately find a way out within the framework of democracy. In the era of regional autonomy with the enactment of Law No. 32 Th 2004 which gives greater authority to local governments to manage wilayahnya, belum able to solve the problems of agrarian society, masyarakat. Prinsip on the principles of justice and public spaces to achieve a policy that is acceptable to many alternative problem solving land disputes. This paper wants to give thought tanah/masyarakat dispute resolution policy networks approach. The purpose of this paper is to explain the policy approach network dalam land disputes. The method used in the writing of this paper is qualitatively using the scientific research procedure. The conclusion of this paper is the approach of policy networks can be used in the

JURNAL IPTEK PERTANAHAN

ISSN 1411-110
Vol. 3
No. 1
2013

settlement of land disputes. Networks and policy through government, civil society, and the private sector can lead to a solution of land disputes through deliberative policies that benefit all parties, especially the interests of the public. Furthermore, public and a democratic egalitarian framework provides opportunities in land disputes.

Keywords: policy networks, land disputes, democracy. Imam Koswahyono (Pusat Pengembangan Hukum Agraria)

Imam Koswahyono (Centre of Agrarian Law Studies)

LEGALIZATION OF STATE OWNED ASSET OF LAND (A NORMATIVE PERSPECTIVE)

Journal IPTEK Pertanian, Volume 3, No.1, May 2013, Page : 57 - 70

ABSTRACT

This article was written based on legal research concerning state owned land. There are still a lot of lands which are held by government agency that have not attached any rights, so it does not have the certainty of rights and the rule of law to do any legal act of a right transfer. Viewed from the scope of the administrative law authorized the local government to lease "land tenure" them to third parties. Based on property terminology in this context, is not owned by a legal term defined as a body of land law or rights which contains the authority, obligations, prohibitions and restrictions on subjects and its object. Dispute "land tenure" the local government that became the case in the Court on the basis of the claim that such land is land directly controlled by the state, so the city government is not entitled to lease land because of conflict with the provisions of Article 44 of the Basic Agrarian Law (BAL) and article 2 g and 7 q Law of Government Treasury. Legalization of state owned is a must since it will support and strengthen national economic development and nation social prosperity.

Keywords: legalisation, land, normative

Rizal Anshari (Agrarian Observer)

CRITICAL REVIEW OF JURIDICAL REGISTRATION TENURE SPACE ABOVE AND BELOW GROUND THROUGH A 3-DIMENSIONAL SYSTEM

Journal IPTEK Pertanian, Volume 3, No.1, May 2013, Page : 71 - 80

ABSTRACT

The city is currently experiencing land on the surface of the earth for construction purposes. Many other countries have already started development in the body above the surface of the earth and the earth. Land rights still have not been able to accommodate the two-dimensional development needs conducted under the earth's surface that lies beneath the land rights of others as well as development in the space above the land rights of others that are 3-dimensional. Anticipating the needs of the institution required the construction of a new law governing the acquisition and use of space under and above the earth's surface in this paper is called the basement tenure and use rights to land space. Rights holders to the basement, allowing for the use of space and has a building in the earth that lies beneath the land rights of others, while holders of land use rights allow the holder a right to use the space and has a building in the space above the land rights of others. The current land registration system needs to be improved in order to accommodate a verification system that contains elements of the pattern space.

Keywords: Land Registration, share space, System Three Dimensions

Bagas Haryo Tejo (Researcher the Ministry of Trade)

REGIONAL ANALYSIS OF INVESTMENT CLIMATE CONDUCIVENESS PERSPECTIVE FROM LAND ACQUISITION FACILITIES CASE STUDY SURABAYA

Journal IPTEK Pertanian, Volume 3, No.1, May 2013, Page : 81 - 96

ABSTRACT

Investment climate of a country or a region reflects the performance of the relevant government policies and regulations in controlling both concept and operational level. In general, currently the investment climate in Indonesia is not in a satisfactory condition. One of the most important that influences the investment climate is land procurement. The main objective of this research is to develop indicators of progress conduciveness or the investment climate, especially from land procurement perspective. While the specific aim are, survey on land procurement and easiness of land using for investment in detail, both in terms of regulation and its implementation that can be measured, analyzed and presented in a transparent and easier to do anticipate policy. Research method used, was a survey on the business aspects (micro) with the Region of East Java as a study area. For the analysis, was considering various aspects of the underlying macro. The result of weighting the investment climate, to see the degree of importance or priority scale obtained. The result of the assessment of investment climate in Surabaya shows that Surabaya, had valued on land clarity 3.546 and land procurement 2.474. It could be concluded that, land procurement for investment in Surabaya was not supported

Investment climate as a whole. Policy implication is that the chances of improving the investment climate, the investment climate will very necessary to improve, at least by improving the performance of various indicators mentioned earlier.

Keywords: Investment Climate, Land Procurement, Indicator.

Shafidatu Muhiyarah, (Research and Development Center, National Land Agency Republic of Indonesia, Jakarta)

AS THE APPLICATION OF BALANCED SCORECARD PERFORMANCE BENCHMARK ASSESSMENT NATIONAL LAND AGENCY

Journal PTEK Pertanahan, Volume 3, No. 1, May 2015, page : 87 - 92

ABSTRACT

Balanced Scorecard is concerning four in perspective that is in perspective of Finance, in perspective of Customer client, Organizations internal in Perspective and learn and growth perspective. Performance is one of vitally factor for a company. The measurement applicable to assess success of company and as compilation base of intracorporate review. Manager that is successfully reaches his basic need will be assessed a success and gets a run for either from company. However, assess company performance solely from finance side will be able to measure because the existing good finance performance reachable is the sign of long-range importances of company. Conversely unfavourable finance performance in short term can happen because company to do investments for the stake of long-range importance. To overcome this insufficiency, hence created by an approach method measuring company performance by considering 4 aspect that is finance aspect, customer client, internal business process and learning process and grows.

Keywords: Balanced Scorecard, Performance, Organization.

Dwi Supriatyo, (Research and Development Center, National Land Agency Republic of Indonesia, Jakarta)

COOPERATION BETWEEN THE NATIONAL LAND AGENCY AND THE MINISTRY OF AGRICULTURE IN ACHIEVING FOOD SECURITY

Journal PTEK Pertanahan, Volume 3, No. 1, May 2015, Page : 115 - 122

ABSTRACT

For Indonesian people, land is a vital element in the life of nation and state. Although mandated in the 1945 Constitution that the land is the source of prosperity for the people, but the amount of poor people of Indonesia are still quite a lot (around 35 million people). This is caused by structure of land tenure, possession, use, and land use (P4T) imbalance. Further, the land issues will have an impact on food security vulnerability that ultimately will affect national security. The availability of land redistribution program implemented by the National Land Board of Republic of Indonesia, can solve a few problem of land tenure imbalance. Farmers are being targeted recipients of this program, can not be left just like that, but it should be empowered so that land acquired can be used in production. For this reason, it is need access reform in order to empower farmers. Ministry of agriculture as a technically competent institution building of farmers, is obliged to guide farmers could work on his land as well. Hopefully the synergy between National Land Board of Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture, Indonesian farmers can empower themselves and the land acquired so as to improve the prosperity of himself and family at once creating a national food security.

Keywords: Land redistribution, access reform.

